



499 Kendaraan Pemkab Belum Bayar Pajak

► Fakta Tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

PASURUAN, SURYA - Sebanyak 499 kendaraan bermotor milik Pemkab Pasuruan diduga belum bayar pajak kendaraan pada tahun anggaran 2022.

Fakta itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Bahwasanya 499 kendaraan yang belum membayar pajak itu tersebar di 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal, sesuai LRA audited Pemkab Pasuruan sudah menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor setiap tahunnya.

Itu berupa Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan masing-masing sebesar Rp1.499.539.534,00 dan Rp1.049.601.252,00 atau sebesar 69,99% dari anggaran. Namun ratusan aset Pemkab belum membayar pajak sesuai dengan hasil audit BPK. Di setiap OPD jumlah kendaraan yang belum bayar pajak beragam.

Ada satu OPD yang temuannya hanya satu kendaraan, ada yang puluhan bahkan mencapai ratusan.

Itu semua tergantung aset di masing-masing OPD.

Setelah ditelusuri, ada beberapa fakta yang terungkap. Salah satunya adalah, kendaraan yang belum bayar pajak ini tidak dikuasai oleh OPD tersebut. Aset itu dikuasai pihak lain dengan status pinjam pakai. Ada juga yang BPKB dan STNKnya ikut terbakar saat kebakaran gudang Pemkab tahun 2008.

Oleh karenanya, OPD tidak bisa membayar pajaknya. Dan itu membuat temuan BPK. Padahal, OPD siap membayar jika semua suratnya tersedia.

Misalnya di Kecamatan Gempol. Ada 5 kendaraan yang tercatat BPK belum membayar pajak. Namun, catatan ini tidak dibenarkan oleh Camat Gempol, Komari. "Kalau kendaraan yang ada di kecamatan itu sudah bayar pajak. Kemungkinan yang belum bayar pajak itu di desa," kata Komari saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Dia bmmengaku tidak mengetahui temuan BPK tersebut. Camat lantas meminta

data temuan BPK ini untuk segera ditindaklanjuti.

Hal sama juga disampaikan Camat Bangil, Fathurrahman. Dia menyampaikan, empat kendaraan yang belum bayar pajak itu ada di empat desa. Semuanya motor dan digunakan sebagai kendaraan operasional perangkat desa. Empat motor itu ada di Desa Masangan, Raci, Manaruwi, dan Tambakan.

"Setelah saya cek, ternyata benar, kendaraan ada di desa. Hari ini saya sudah minta para kepala desa untuk segera membayar pajaknya," ungkapnya.

Sekretaris Camat Kejayan Heri Sri Wahyudi, menampik temuan BPK ini. Ia bahkan mengklaim semua kendaraan aset Kecamatan Kejayan bayar pajak. Dari temuan BPK, ada 13 kendaraan yang belum membayar pajak. Ia juga mengaku heran, kenapa hanya ada 13 temuan saja jika memang kendaraan itu ada desa.

"Aneh tapi ya mas, desa disini ada 24 desa kenapa yang jadi temuan hanya di 13 desa saja. Cobalah nanti saya



PAJAK MATI - Kendaraan milik Pemkab Pasuruan yang diduga kuat pajak 5 tahunannya mati dan belum dibayar.

sampaikan dalam forum rapat dengan desa," urainya.

Camat Gondangwetan, M Taufik Hidayat membenarkan dan sama dengan sebelumnya, kendaraan belum bayar pajak ada di desa. "Benar ada di desa - desa mas. Ini segera kami tindaklanjuti dengan meminta para kepala desa membayar pajaknya," ujarnya.

Berbeda lagi dengan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi, mengaku selalu terkendala dengan satu ken-

daraan dinas itu.

Dia tidak menampik ada satu kendaraan yang menjadi asetnya itu belum membayar pajak. Hanya saja, kendalanya bukan karena itu dipinjam pakai. Tapi karena surat kendaraan itu sudah tidak ada. Sehingga, pihaknya kesulitan untuk membayar pajaknya. STNK dan BPKBnya terbakar.

"Dulu tahun 2008 kan ada kebakaran kantor Pemkab di Jalan Hayam Wuruk. Nah, kebetulan surat suratnya

dulu juga ikut terbakar," ungkapnya.

Menurut Suwito, kendaraan yang tidak bisa dibayar pajak itu sudah tidak digunakan. Disampainya, motor itu sudah mengalami rusak parah. "Sudah tidak digunakan mas, kendaraannya ada di gudang. Sebenarnya pajaknya murah tidak sampai Rp 50.000 karena motor lama," imbuhnya.

Hal sama juga terjadi di Dinas Perhubungan (Dishub). Bambang Yulianto, Kasubag Keuangan Dishub menyebut memang ada tiga kendaraan yang belum bayar pajak.

Dua kendaraan sudah dibayarkan pajaknya setelah catatannya mendapatkan kendaraan yang belum bayar pajak. Kendaraan itu berupa truk crane Penerangan Jalan Umum (PJU). Truk ini tidak bisa dibayarkan pajaknya karena BPKB dan STNK ikut terbakar di Kantor Pemkab.

"Ya ini kami juga mohon arahan dan jalan keluarnya seperti apa. Kalau truknya masih beroperasi untuk memperbaiki PJU - PJU yang rusak," sambungnya.

Sekretaris Dspendik Kabupaten Pasuruan Imam

Syaifi juga tidak menampik ada 43 kendaraan dinas yang menjadi aset Dspendik belum membayar pajak. Hanya saja, puluhan kendaraan yang belum bayar pajak itu bukan di dinas, tapi ada di sekolah - sekolah dengan status pinjam pakai.

"Mayoritas yang dibawa lembaga belum dibayarkan pajaknya. Kalau yang ada di dinas insya allah sudah terbayarkan semuanya," imbuhnya.

Disampainya, seharusnya yang meminjam aset dinas ini yang bertanggung jawab untuk membayar pajaknya. Karena di dinas tidak menganggarkan untuk itu.

"Kalau yang statusnya dipinjam bukan tanggung jawab kami. Tapi, begini, nanti akan kami komunikasikan dengan lembaga agar segera dibayar," tuturnya.

Di sisi lain, kata Imam, ada beberapa kendaraan yang rusak dan sudah tidak bisa digunakan. Dia juga mengaku akan koordinasi untuk mengusulkan penghapusan aset. "Ya kalau sudah tidak bisa digunakan, dan tidak bisa dioperasikan buat apa dibayar pajak. Nanti kami koordinasikan segera dengan bidang aset," ungkapnya. (lih)